



Sistem Informasi Data Akreditasi (SIDAK) untuk Pengumpulan Dokumen Borang Standar BAN-PT dalam Aktualisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK

**Nurul Fauziah¹, Heni Mardiningsih²,
Syarif Bahaudin Mudore³, Deni Fikari⁴, Khoirunnisa⁵**

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

² Widyaiswara Administrasi, Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁵ Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

Email : nurulf@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, heni.mardiningsih@yahoo.com²,
syarif.mudore@radenintan.ac.id³, denifikari@radenfatah.ac.id⁴,
khoirunnisa123@iaincurup.ac.id⁵

Abstrak

Latar belakang pengabdian ini adalah banyaknya data yang diperlukan ketika proses akreditasi masih menjadi permasalahan setiap lembaga pada saat penyusunan Lembar Evaluasi Diri (LED). Sehingga pengabdian ini memiliki tujuan untuk mengaktualisasikan program rancangan perubahan pada satuan kerja dari kegiatan pelatihan dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan Pertama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan panitia penyelenggara berasal dari Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya. Adapun program yang dibuat dalam menerapkan *core value* Ber-AKHLAK adalah pembuatan website SIDAK dalam proses pengumpulan data IAPT. Untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat berbasis aktualisasi pada satuan kerja di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka proses pengabdian ini menggunakan model *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi secara maksimal yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Adapun tahapannya berupa 1) identifikasi isu actual menggunakan tapisan APKL (actual, prolemtik, kekhalayakan dan kelayakan), USG (*urgency, seriousness, growth*) dan diagram *fishbone*; 2) proses pengumpulan data pada website SIDAK melalui tiga tahapan, yaitu Komunikasi dengan tim borang IAPT; Pengumpulan dokumen berdasarkan kode data; Input data pada website sidak sesuai dengan kriteria. Pengabdian ini amat penting karena; *pertama*, sebagai bentuk pengarsipan digital dokumen, *kedua*, mempermudah asesor dalam proses asesmen lapangan, *ketiga*, membantu semua unit yang ada di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Menyusun laporan evaluasi diri (LED) untuk kepentingan akreditasi.

Kata kunci: Aktualisasi, ASN Ber-AKHLAK, Dokumen Borang, SIDAK.

Accreditation Data Information System (SIDAK) for Collecting BAN-PT Standard Form Documents in the Actualization of ASN's Core Values with Achievement

Abstract

The background of this service is that the amount of data required during the accreditation process is still a problem for each institution when preparing the Self Evaluation Sheet (LED). So that this service has the aim of actualising the change design program in the work setting of the basic training activities (Latsar) CPNS Golongan III First Batch of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia with the organising committee coming from the Surabaya Religious Education and Training Center (BDK). The program created in implementing the Ber-AKHLAK core value is the creation of the SIDAK website in the IAPT data collection process. To achieve the objectives of actualisation-based community service in work units at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, this service process uses the Participatory Technnology Development model that makes maximum use of technology based on science and local wisdom. The stages are 1) identification of actual issues using APKL (actual, prolematic, feasibility and feasibility), USG (urgency, seriousness, growth) and fishbone diagrams; 2) data collection process on the SIDAK website through three stages, namely Communication with the IAPT form team; Document collection based on data codes; Data input on the sidak website in accordance with the criteria. This service is very important because; first, as a form of digital archiving of documents, second, it makes it easier for assessors in the field assessment process, third, it helps all units within UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu in preparing self-evaluation reports (LED) for accreditation purposes.

Keywords: Actualisation, ASN Ber-AKHLAK, Borang Document, SIDAK.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag), memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Program Latihan Dasar CPNS (LATSAR) merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan bahwa calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima di lingkungan Kemenag memiliki kompetensi dasar yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. LATSAR dirancang untuk memberikan pelatihan dasar yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang agama.

LATSAR bertujuan untuk memastikan bahwa CPNS memiliki kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif (Suharno, 2020). Program ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan tentang administrasi pemerintahan, etika profesional, keterampilan komunikasi, dan manajemen waktu, yang esensial untuk keberhasilan dalam pekerjaan pemerintahan. Dengan adanya LATSAR, diharapkan ada standar kualitas yang konsisten di seluruh pegawai negeri sipil. Ini penting untuk memastikan bahwa semua CPNS, terlepas dari latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka sebelumnya, memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang sama. LATSAR juga bertujuan untuk meningkatkan sikap profesional dan etika kerja CPNS. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang kode etik dan nilai-nilai yang dipegang dalam birokrasi, serta pentingnya integritas dan pelayanan public (Rizaldy & Sugiyanto, 2022).

Selain itu dunia pemerintahan dan administrasi terus berubah, dengan munculnya tantangan dan tuntutan baru. LATSAR membantu CPNS untuk beradaptasi dengan perubahan ini melalui pembelajaran tentang kebijakan terbaru, teknologi informasi, dan praktek-praktek terbaik dalam pemerintahan (Novia et al., 2020). Dengan meningkatkan

kompetensi individu, LATSAR berkontribusi pada penguatan kapasitas organisasi secara keseluruhan. Pegawai yang terlatih dengan baik dapat bekerja lebih efisien dan efektif, mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

LATSAR membantu CPNS untuk memahami struktur dan proses birokrasi pemerintahan. Ini penting agar mereka dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku, serta berkolaborasi dengan baik di dalam lingkungan organisasi pemerintahan. LATSAR memberikan persiapan yang komprehensif bagi CPNS untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban. Ini termasuk pelatihan dalam hal administrasi, manajemen proyek, dan keterampilan lain yang relevan dengan peran mereka (Utama et al., 2022).

Aktualisasi pada program LATSAR merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan terkini, mendukung pengembangan kompetensi CPNS dengan cara yang paling relevan dan bermanfaat (Yamin et al., 2021). Aktualisasi membantu memastikan bahwa materi pelatihan tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh CPNS saat ini (Matippanna, 2020a). Ini mencakup pembaruan dalam konten terkait kebijakan, prosedur, dan alat-alat yang digunakan dalam administrasi pemerintahan. Aktualisasi program LATSAR memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik organisasi, memastikan bahwa pelatihan selaras dengan tujuan strategis dan operasional lembaga (Matippanna, 2020b).

Belum optimalnya ketersediaan data IAPT (Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi) sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan efisien, sehingga data yang diperlukan sulit dikumpulkan secara komprehensif dan tepat waktu. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara data yang tersedia dengan standar akreditasi yang ditetapkan, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya data akurat di kalangan staf pengelola, turut berkontribusi pada masalah ini. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan untuk pengelolaan data juga dapat menjadi penyebab, yang menghambat proses pengumpulan dan penyajian data yang sesuai dengan kriteria akreditasi yang ditetapkan.

Selain itu belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat berdampak signifikan terhadap proses akreditasi institusi. Pertama, hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat atau tidak lengkap oleh tim akreditasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan peringkat akreditasi atau penundaan dalam mendapatkan akreditasi. Kedua, kekurangan data yang relevan dan tepat waktu dapat menghambat perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, yang penting untuk peningkatan mutu akademik dan administrasi. Ketiga, masalah ini dapat mempengaruhi reputasi institusi di mata calon mahasiswa, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, mengurangi daya tarik dan kepercayaan terhadap UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Keempat, kesulitan dalam memenuhi standar akreditasi dapat mempengaruhi alokasi dana dan dukungan dari pemerintah atau lembaga donor yang sering kali bergantung pada status akreditasi sebagai salah satu indikator kualitas.

METODE

Sebagai bentuk pencapaian tujuan dari pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan aktualisasi program perubahan pada pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama RI Golongan III Angkatan I tahun 2024 di BDK Surabaya dengan satuan kerja di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka digunakan media *Participatory Technology Development* yang memanfaatkan teknologi secara maksimal yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan budaya lokal (Syamsunarno et al., 2020). Adapun tahapannya berupa (1)

melakukan identifikasi dan deskripsi isu actual menggunakan tapisan APKL, USG dan Fishbone; (2) proses pengumpulan data pada website sidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Deskripsi Isu Aktual di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Masalah dapat dilihat sebagai suatu tantangan. Dalam hal ini, masalah seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang negatif atau membawa dampak buruk bagi suatu lembaga atau organisasi (Muhammad et al., 2024). Sebaliknya, keberadaan masalah atau isu dapat menjadi faktor penting dalam evaluasi lembaga untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan (Mahaputra, 2022). Dengan menganggap masalah sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas diri dan organisasi, hal ini akan mendorong cara pandang yang lebih konstruktif, seperti upaya mencari solusi, menetapkan alternatif penyelesaian, dan mengatasi konflik berdasarkan identifikasi isu-isu aktual (Wahab Samad, 2022).

Adapun isu yang didapat berdasar hasil pengamatan dan pengalaman mentor dan teman-teman di LPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut: *pertama*, belum adanya persamaan persepsi antar dosen pada mata kuliah umum di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur berdasarkan pencapaian tujuan akhir dari proses tersebut. Proses belajar-mengajar adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa dan mutu pendidikan, yang dipengaruhi secara signifikan oleh peran dosen (Kholik et al., 2022). Dosen dalam hal ini berperan sebagai sumber pengetahuan utama dan pertama bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, dosen berfungsi sebagai sumber pengetahuan utama dan pertama bagi mahasiswa di perguruan tinggi (Sudaryono et al., 2019). Sebagai sumber pengetahuan utama, persamaan persepsi dosen terkait mata kuliah umum sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan supaya tidak adanya kesepahaman atau kesamaan pandangan di antara dosen-dosen mengenai materi, tujuan, dan metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan para dosen dalam acara konsinyering AIPT Unggul, bahwa pada kenyataannya dosen di UIN masih belum satu pintu mengenai persepsi terkait mata kuliah umum.

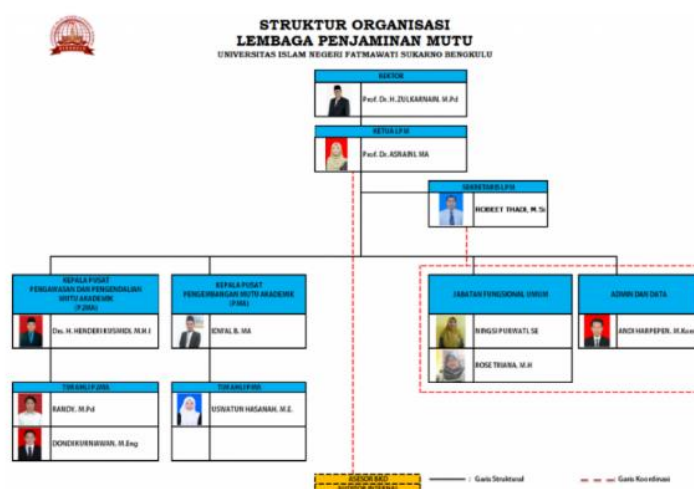
Belum adanya persamaan persepsi antar dosen pada mata kuliah umum dapat mempengaruhi efektivitas manajemen ASN dan implementasi Smart ASN di UIN FAS Bengkulu. Dalam manajemen ASN, ketidaksesuaian pemahaman di antara dosen dapat mengakibatkan variasi dalam kualitas pengajaran dan kesulitan dalam evaluasi kinerja yang objektif. Hal ini menyulitkan manajemen dalam menjamin standar pendidikan yang konsisten dan adil. Sementara itu, dalam konteks Smart ASN, yang mengandalkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, ketidakselarasan persepsi antar dosen dapat menghambat pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran secara optimal, menghasilkan data yang tidak konsisten, dan mengurangi efektivitas inovasi berbasis teknologi.

Kedua, perbedaan RPS pada mata kuliah penciir UIN di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah proses yang krusial dalam pendidikan tinggi karena RPS berfungsi sebagai panduan terperinci mengenai tujuan, materi, metode, dan penilaian dalam suatu mata kuliah (Damayanti et al., 2023). Menurut (Sutrisno, 2016) RPS sebaiknya disusun dengan fokus pada pencapaian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa, sehingga materi ajar dan metode pengajaran dapat diselaraskan dengan tujuan pembelajaran yang spesifik.

Namun pada kenyataannya, tidak semua dosen menyusun RPS terfokus pada pencapaian kompetensi. Hal ini disampaikan oleh ketua LPM UIN FAS Bengkulu dalam kegiatan Workshop Penyusunan Standar Perguruan Tinggi. Terutama pada RPS mata kuliah penciir UIN. Perbedaan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) pada mata kuliah penciir UIN mengacu pada variasi dalam rencana pengajaran yang dibuat oleh dosen untuk mata kuliah yang memiliki ciri khas atau identitas khusus di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Ini dapat mencakup perbedaan dalam tujuan pembelajaran,

Dalam kaitannya dengan manajemen ASN, perbedaan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian standar pengajaran untuk memastikan bahwa dosen sebagai ASN dapat memenuhi kebutuhan spesifik mahasiswa dan tujuan pendidikan yang berbeda. Manajemen ASN harus mempertimbangkan keragaman ini dalam evaluasi dan pengembangan profesional dosen agar mereka dapat mengajar dengan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah penciiri. Di sisi lain, dalam konteks Smart ASN, perbedaan RPS ini memerlukan sistem yang cerdas untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai kurikulum dan pendekatan pengajaran.

Ketiga, belum jelasnya tusi/tupoksi dan koneksi antara LPM, UPM dan GPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Berkaitan dengan tusi/tupoksi, berikut ditampilkan struktur organisasi lembaga penjaminan mutu di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Gambar 1. Struktur LPM berdasarkan Web LPM

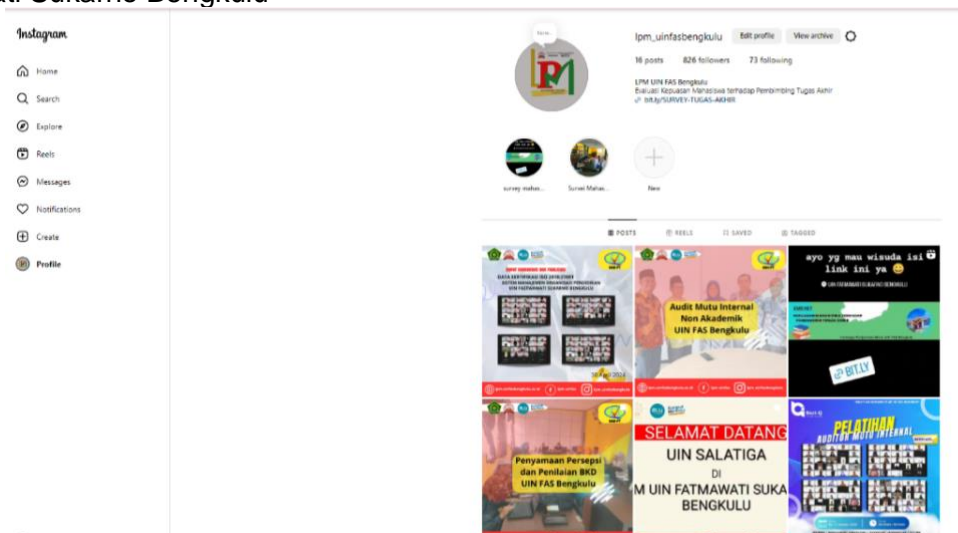
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan Lembaga yang memiliki kebijakan terkait Sistem Penjaminan Mutu di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tercapainya tumbuh kembangnya budaya mutu di lingkungan kampus. System penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu (Anggraeni, 2021). Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses yang melibatkan penetapan dan pemenuhan standar kualitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (Alawiyah, 2012).

Berhasil tidaknya sistem penjaminan mutu di lingkup universitas tidak lepas dari bantuan UPM dan GPM. Belum jelasnya tugas (tugas dan fungsi) dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta koneksi antara LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), UPM (Unit Penjaminan Mutu), dan GPM (Gugus Penjaminan Mutu) berarti tidak ada pemahaman yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar lembaga ini dalam sistem penjaminan mutu di institusi pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dan koordinasi yang buruk antara unit-unit terkait.

Dalam konteks manajemen ASN, ketidakjelasan ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan mutu karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penjaminan mutu. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi tugas, kebingungan dalam pelaksanaan tugas, dan pengawasan mutu yang tidak konsisten. Sementara itu, dalam kerangka Smart ASN, yang mengandalkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, ketidakjelasan tisi/tupoksi dan koneksi

antar lembaga dapat menghambat integrasi sistem manajemen mutu yang berbasis data (Harpendi et al., 2021). Teknologi Smart ASN memerlukan struktur dan peran yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Keempat, belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram LPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



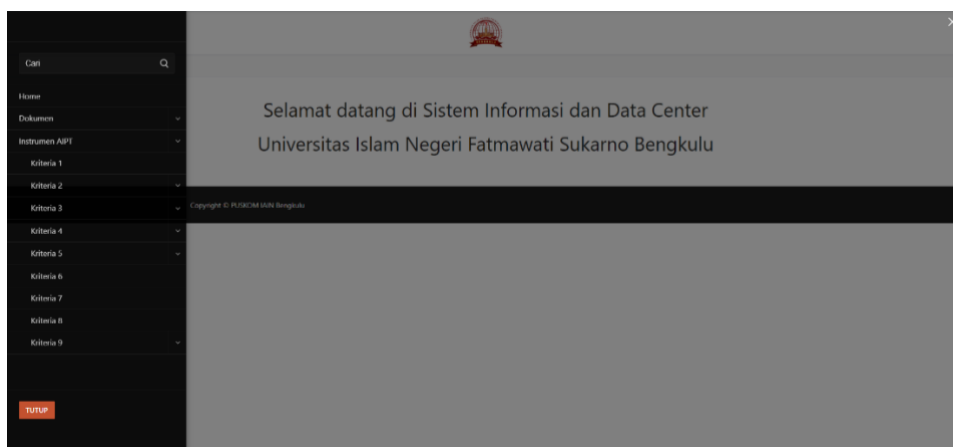
Gambar 2. Instagram LPM

Lembaga penjaminan mutu merupakan Lembaga yang memberikan pelayanan terkait proses peningkatan mutu fakultas (Sulaiman & Wibowo, 2016). LPM juga memberikan berbagai pelayanan kepada mahasiswa berupa survei kepuasan pengguna sebagai salah satu syarat wisuda dan informasi lain seperti akreditasi program studi dan juga informasi terkait pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan di Universitas. Dimana seluruh informasi tersebut dapat diakses melalui WEB LPM yaitu <https://lpm.uinfasbengkulu.ac.id/>.

Namun pada kenyataannya, seluruh informasi yang dapat diakses di WEB tersebut, tidak tersampaikan dengan baik. Tidak sedikit mahasiswa yang masih berdatangan di Gedung LPM hanya sekedar meminta file akreditasi kampus. Yang dimana file tersebut dapat diakses di web LPM. Hal ini bentuk dari salah satu kurangnya promosi atau penggunaan dalam hal edukasi atau sekedar memberikan informasi terkait alur pemerolehan yang ada di web LPM tersebut.

Dalam konteks manajemen ASN, pemanfaatan media sosial yang kurang optimal seringkali mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan atau keterampilan digital di antara staf ASN. Manajemen ASN yang efektif harus memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan dukungan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal, termasuk media sosial. Konsep Smart ASN, yang mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga relevan di sini (Atika Ayuningtyas, 2022). Dalam hal ini, penggunaan media sosial Instagram seharusnya menjadi bagian dari strategi Smart ASN untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat. Ketidakefektifan pemanfaatan Instagram bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang alat dan fitur digital yang ada, serta tidak adanya strategi komunikasi yang terencana dengan baik.

Kelima, belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Berikut ditampilkan gambar ketersediaan data akreditasi.



Gambar 3. Ketersediaan data akreditasi 9 kriteria

Data IAPT (Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi) sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan disusun untuk memenuhi standar penilaian dalam proses akreditasi institusi pendidikan (Lessy et al., 2022). Dokumen akreditasi biasanya mencakup sembilan kriteria utama, seperti tata kelola institusi, kualitas pengajaran, fasilitas, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang masing-masing memerlukan data yang spesifik dan terperinci (Farida Yusuf et al., n.d.). Data IAPT harus mencakup informasi yang relevan dan terkini untuk setiap kriteria tersebut, seperti data kinerja akademik, statistik mahasiswa, dan evaluasi program. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam setiap kriteria ini penting untuk memastikan bahwa institusi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar akreditasi dan mendapatkan penilaian yang baik. (Early, S, 2017).

Ketersediaan data IAPT di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum optimal, karena data yang ada belum tersusun secara rapi berdasarkan 9 kriteria yang diperlukan untuk dokumen akreditasi. Ini menyebabkan proses penyusunan laporan akreditasi menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan kualitas akreditasi, perlu ada upaya untuk memperbaiki dan melengkapi data sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Belum adanya data IAPT untuk kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria dapat berdampak signifikan pada manajemen ASN dan penerapan Smart ASN. Dalam konteks manajemen ASN, kekurangan metadata menghambat proses pengelolaan dan evaluasi dokumen akreditasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar kualitas pendidikan dipenuhi. Tanpa metadata yang jelas, manajemen kesulitan dalam melacak dan mengelola informasi penting, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam proses akreditasi dan kesulitan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan.

Teknik Tapisan adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai dokumen atau laporan dengan fokus pada empat aspek utama: Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan. Alat analisis APKL digunakan untuk menentukan kriteria isu. Adapun acuan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan need assessment dengan menentukan peringkat/ranking dan skor 1 sampai 5 sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1. Penetapan Isu Utama dengan Metode APKL

No	Identifikasi Isu	A	P	K	L	Jumlah Total	Rangking
1	Belum adanya persamaan persepsi antar dosen pada mata kuliah umum di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	3	3	3	4	13	V
2	Perbedaan RPS pada mata kuliah penciri UIN Fatmawati	4	3	4	3	14	IV

	Sukarno Bengkulu						
3	Belum jelasnya tusi/tupoksi dan koneksi antara LPM, UPM dan GPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	5	5	4	3	18	III
4	Belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram LPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	5	5	5	4	19	I
5	Belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	5	5	4	4	18	II

Matrik analisis APKL membeikan hasil bahwa prioritas permasalahan yang menduduki peringkat pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram LPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan jumlah nilai 19, kemudian untuk isu pada peringkat kedua berupa belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan jumlah 18, dan untuk kualitas isu pada peringkat ketiga berupa belum jelasnya tusi/tupoksi dan koneksi antara LPM, UPM dan GPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan jumlah nilai 17. Hasil tersebut diperoleh dari kuesioner yang telah disebar kepada mahasiswa.

Setelah menggunakan tapisan issue APKL, kemudian dianalisis menggunakan tapisan issue kedua berupa USG. Tapisan isu Urgent Seriousness Growth merujuk pada metode analisis yang digunakan untuk menilai isu-isu berdasarkan tiga kriteria utama: Urgensi, Keseriusan, dan Pertumbuhan.

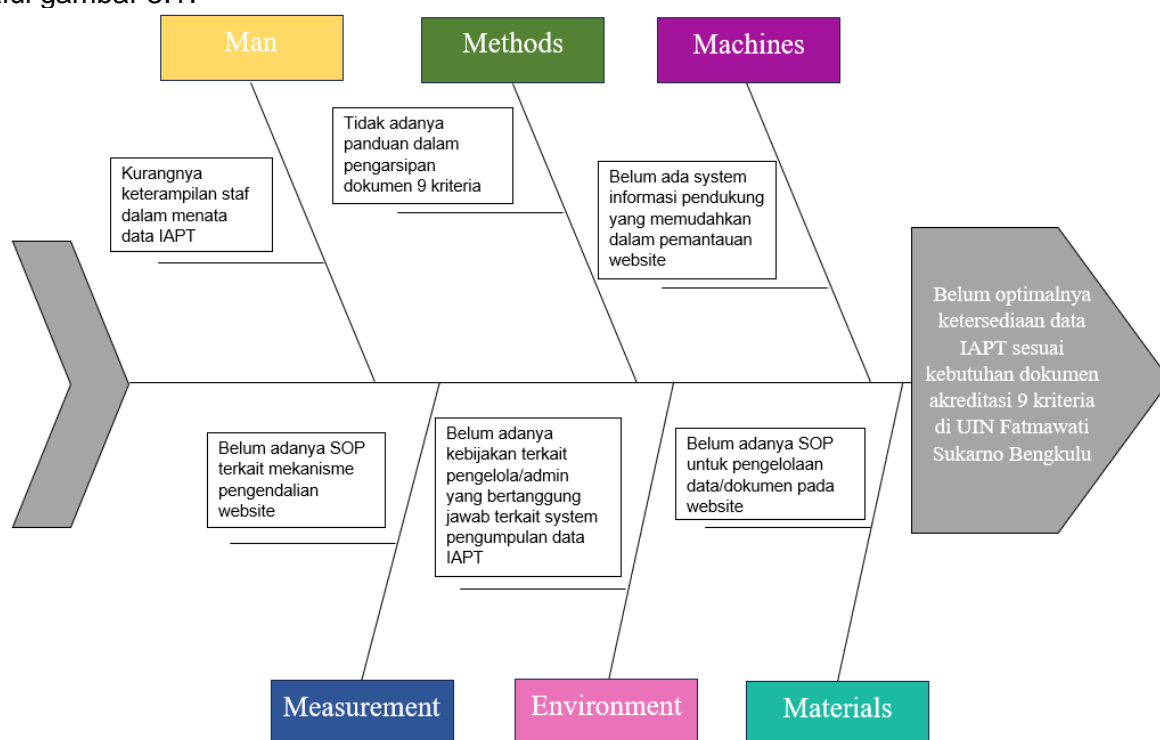
Tabel 2. Penetapan Isu Utama dengan Metode USG

No	Identifikasi Isu	Skala			Total	Rangking
		Urgency	Seriousness	Growth		
1	Belum jelasnya tusi/tupoksi dan koneksi antara LPM, UPM dan GPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	4	4	4	12	III
2	Belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram LPM di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	5	4	4	13	II
3	Belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	5	4	5	14	I

Bedasarkan matrik di atas dapat diketahui mengenai hasil penjelasan dari tapikal issue USG belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi

9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menduduki posisi pertama dengan jumlah nilai 14. Hal ini diperoleh atas dasar saran yang diberikan oleh mentor. Isu utama ini diangkat dalam aktualisasi latsar karena dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan metode fishbone diagram untuk mengetahui alasan terjadinya permasalahan tersebut. Fishbone diagram, yang juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab-akibat, adalah alat manajemen kualitas yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menganalisis penyebab utama dari suatu masalah atau efek yang tidak diinginkan. Diagram ini dinamakan demikian karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan, di mana "kepala ikan" mewakili masalah utama dan "tulang-tulang" mewakili kategori penyebab yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Adapun berdasarkan isu di atas, maka dapat penulis telah merumuskan beberapa sebab dari munculnya isu tersebut. Hal itu dapat dilihat melalui gambar 3.1.



Gambar 4. Diagram *fishbone*

Data IAPT (Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi) sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan disusun untuk memenuhi standar penilaian dalam proses akreditasi institusi pendidikan. Dokumen akreditasi biasanya mencakup sembilan kriteria utama, seperti tata kelola institusi, kualitas pengajaran, fasilitas, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang masing-masing memerlukan data yang spesifik dan terperinci. Data IAPT harus mencakup informasi yang relevan dan terkini untuk setiap kriteria tersebut, seperti data kinerja akademik, statistik mahasiswa, dan evaluasi program. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam setiap kriteria ini penting untuk memastikan bahwa institusi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar akreditasi dan mendapatkan penilaian yang baik. (Early, S, 2017).

Ketersediaan data IAPT di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum optimal, karena data yang ada belum tersusun secara rapi berdasarkan 9 kriteria yang diperlukan untuk dokumen akreditasi. Ini menyebabkan proses penyusunan laporan akreditasi menjadi kurang akurat. Untuk meningkatkan kualitas akreditasi, perlu ada upaya untuk memperbaiki dan melengkapi data sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan tapikal issue USG bahwa belum optimalnya ketersediaan data IAPT sesuai kebutuhan dokumen akreditasi 9 kriteria di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menduduki posisi pertama dengan jumlah nilai 14. Hal ini dilakukan melalui kuesioner yang disebar kepada mahasiswa. Isu utama ini diangkat dalam aktualisasi latsar karena dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Proses Pengumpulan data pada Website SIDAK

Pengumpulan data IAPT (Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi) untuk keperluan akreditasi 9 kriteria adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan sembilan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses ini mencakup beberapa langkah, termasuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung penilaian akreditasi perguruan tinggi dalam aspek seperti visi, tata kelola, kualitas dosen, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, sumber daya, serta prestasi lulusan. Setiap kriteria memiliki indikator dan komponen khusus yang perlu diisi dengan data yang akurat, sesuai dengan kondisi perguruan tinggi. Pengumpulan data yang terstruktur dan akurat akan memudahkan dalam menyusun laporan evaluasi diri dan menyiapkan bukti pendukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian akreditasi, sehingga meningkatkan peluang perguruan tinggi mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik. Adapun standar borang dari Ban PT terdiri dari 9 kriteria berupa Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia; Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; serta Luaran dan Capaian Tridarma Perguruan Tinggi (Fandi et al., 2012).

Untuk menghasilkan dokumen akreditasi yang sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat tiga tahapan utama yang perlu dilakukan, yaitu komunikasi dengan tim borang IAPT, pengumpulan dokumen berdasarkan kode data, dan input data pada website Sistem Informasi Data Akreditasi (SIDAK) sesuai kriteria. Tahapan ini saling berkaitan dan memerlukan kerjasama antaranggota tim agar hasil yang diperoleh optimal. Artikel ini membahas setiap tahapan tersebut secara rinci dengan menyoroti pentingnya setiap langkah dalam mendukung kelancaran proses akreditasi:

Pertama, Komunikasi dengan tim borang IAPT. Tahapan pertama dalam pengumpulan data IAPT adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan tim borang. Tim borang adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen akreditasi. Komunikasi yang baik di tahap awal sangat penting karena berfungsi untuk memastikan pembagian tugas, pemahaman bersama tentang standar akreditasi, dan sinkronisasi antara berbagai unit kerja dalam institusi. Dalam praktiknya, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi formal, dan grup komunikasi daring untuk mempercepat proses koordinasi.



Gambar 5. Proses komunikasi dengan tim borang

Pada tahap ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi anggota tim borang sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, misalnya koordinator, pengumpul data, dan penyusun narasi. Tim juga perlu memastikan pemahaman yang sama mengenai 9 kriteria dalam IAPT, sehingga setiap anggota memahami jenis data dan dokumen yang harus dikumpulkan. Salah satu contoh nyata adalah ketika tim borang mengidentifikasi kebutuhan data untuk kriteria 4 (Sumber Daya Manusia), mereka harus memastikan bahwa informasi tentang dosen, seperti jabatan akademik, pendidikan terakhir, dan sertifikasi profesi, tersedia secara lengkap. Komunikasi yang efektif juga membantu mengatasi potensi kesalahpahaman, misalnya dalam interpretasi kode data atau format dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, komunikasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti kepala unit terkait (misalnya, bagian keuangan atau perpustakaan), menjadi bagian penting dari proses ini. Informasi yang diberikan oleh unit-unit ini nantinya akan digunakan untuk mendukung klaim program studi terhadap capaian tertentu. Tim borang juga harus mampu menyampaikan pentingnya kontribusi setiap unit dalam memenuhi standar akreditasi agar semua pihak berkomitmen untuk mendukung proses ini.

Kedua, pengumpulan dokumen berdasarkan kode data. Tahapan kedua adalah pengumpulan dokumen berdasarkan kode data yang ditentukan oleh BAN-PT. Setiap data atau informasi yang dibutuhkan untuk akreditasi memiliki kode unik yang mengacu pada format baku BAN-PT. Proses ini melibatkan inventarisasi dokumen, pencarian dokumen fisik atau digital, serta validasi dokumen untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar.



Gambar 6. Proses pengumpulan data

Langkah pertama dalam tahap ini adalah menyusun daftar kebutuhan dokumen berdasarkan kriteria. Misalnya, untuk kriteria 5 (Keuangan, Sarana, dan Prasarana), diperlukan dokumen seperti laporan anggaran tahunan, rincian penggunaan dana, dan inventaris fasilitas. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan dari unit keuangan, bagian administrasi umum, atau unit fasilitas kampus. Penggunaan kode data sangat membantu dalam proses ini, karena setiap dokumen dapat diorganisir secara sistematis, sehingga mengurangi risiko kekeliruan atau pengulangan.

Setelah dokumen terkumpul, tim borang harus melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi melibatkan pengecekan kesesuaian dokumen dengan format yang diinginkan, sedangkan validasi memastikan keabsahan dokumen, misalnya melalui pengecekan tanda tangan atau cap resmi. Dalam beberapa kasus, tim borang juga perlu melakukan komunikasi ulang dengan pihak yang bersangkutan jika dokumen yang diterima belum lengkap atau tidak sesuai. Digitalisasi dokumen menjadi bagian penting dalam tahap ini. Dengan memindai dan menyimpan dokumen dalam format digital, tim dapat memastikan dokumen mudah diakses dan tidak hilang (Farida et al., 2022). Selain itu, pengelompokan dokumen berdasarkan kode data dalam folder digital yang rapi mempercepat proses penginputan data pada tahap berikutnya. Pengumpulan dokumen berdasarkan kode data tidak hanya mempermudah organisasi data tetapi juga memastikan bahwa semua bukti fisik mendukung narasi yang disusun dalam dokumen akreditasi.

Ketiga, input data pada website sidak sesuai dengan kriteria. Tahapan terakhir adalah input data pada website Sistem Informasi Data Akreditasi (SIDAK). SIDAK adalah platform digital yang digunakan untuk mengunggah data dan dokumen akreditasi, sesuai dengan format dan kriteria yang ditentukan oleh BAN-PT. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi karena data yang diinput harus sesuai dengan tabel atau narasi yang telah disusun

sebelumnya. Langkah pertama dalam tahap ini adalah mengakses SIDAK dengan menggunakan akun yang telah diberikan kepada tim borang. Setelah masuk, tim borang akan menemukan struktur data yang sudah sesuai dengan kriteria IAPT, baik dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Proses input data dimulai dengan memasukkan data yang menjadi pendukung pada kriteria 1, dilanjut hingga kriteria 9. Dokumen yang diunggah merupakan dokumen pendukung yang akan diminta oleh asesor ketika proses asesmen lapangan.



Gambar 7. Proses input data ke *website*

Tujuan dari adanya input data berbasis website ini supaya dapat mempermudah asesor dalam proses pembuktian terkait laporan evaluasi diri (LED) yang telah disubmit pada situs Ban PT. proses penginputan tersebut Setiap dokumen dihubungkan dengan kode data yang sesuai, sehingga dapat dengan mudah diverifikasi oleh asesor. Proses ini memerlukan pengelolaan file yang baik, termasuk memastikan format file sesuai (misalnya, PDF), ukuran file tidak terlalu besar, dan nama file mencerminkan isi dokumen. Kesalahan input data menjadi tantangan yang sering muncul dalam tahap ini, terutama jika data yang dimasukkan tidak konsisten dengan dokumen pendukung. Oleh karena itu, tim borang biasanya melakukan pengecekan ulang sebelum mengirimkan data ke sistem. Setelah semua data dan dokumen diinput, langkah terakhir adalah menyimpan dan mengirimkan data untuk ditinjau oleh BAN-PT.

Pembahasan dari hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mempersiapkan dokumen IAPT sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, koordinasi antarunit kerja, dan kesadaran semua pihak di dalam program studi mengenai pentingnya akreditasi. Digitalisasi data menjadi solusi utama dalam meminimalkan tantangan manual yang sering kali memakan waktu dan rawan kesalahan. Selain itu, proses pengumpulan data ini memberikan wawasan mendalam bagi program studi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, tidak hanya demi memenuhi persyaratan akreditasi tetapi juga dalam rangka meningkatkan kualitas secara holistik.

SIMPULAN

Kegiatan aktualiasi pelatihan dasar CPNS ini sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat berupa program perubahan pada satuan kerja UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui pembuatan *website* SIDAK, di mana pengabdian tersebut terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Pengabdian ini amat penting karena, *pertama*, sebagai bentuk pengarsipan digital dokumen; *kedua*, mempermudah asesor dalam proses asesmen lapangan; *ketiga*, membantu semua unit yang ada di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam menyusun laporan evaluasi diri (LED) untuk kepentingan akreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2012). PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI. *Jurnal Aspirasi*, 2. http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia.
- Anggraeni, A. E. (2021). *Penerapan Etika Komunikasi di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Madura* [Thesis (Diploma)]. IAIN Madura.
- Assingkily, M. S., Patra, T. I., Fua, J. L., & Mardiningsih, H. (2024). Aktualisasi Core Values ASN Ber-AKHLAK Melalui “DILAN PERMANEN”: Aplikasi Layanan Digital Penelitian Mandiri Dosen di IAIN Kendari. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 284–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v3i3.255>.
- Atika Ayuningtyas. (2022). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MENUJU ERA SMART ASN*. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i4.312>.
- Damayanti, W., Fuadin, A., & Wijaya Abdul Rozak, R. (2023). ANALISIS DAN REDESAIN RPS BERBASIS RISET UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 6C MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA. *Semantik*, 12(2), 251–264. <https://doi.org/10.22460/semantik.v12i2.p251-264>.
- Fandi, C. S., Wiwik, A., & Ahmad, M. (2012). Pembuatan Dashboard Berbasis Web Sebagai Sarana Evaluasi Diri Berkala untuk Persiapan Penilaian Akreditasi Berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknik*, 1.
- Farida, Y., Didit, H., & Ahmad, I. (2022). Implementasi Dashboard Instrumen Akreditasi 9 Kriteria BAN PT Berbasis Web pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar. *Jurnal Fokus Elektroda*, 07(03), 169–171.
- Farida Yusuf, Didit Hermawan, & Ahmad Ilham. (n.d.). Implementasi *Dashboard* Instrumen Akreditasi 9 Kriteria BAN PT Berbasis Web pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains & Teknologi UIN Alaudin Makassar. *Jurnal Fokus Elektroda*.
- Harpendi, R., M. DHANY AL SUNAH, & Urfan Feri. (2021). *MENCIPTAKAN SMART ASN MENUJU 4.0 DI KANTOR CAMAT KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH* (Vol. 3, Issue 1).
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2045>.
- Lessy, D., Riaddin, D., Supriadi, N., & Sehuwaky, N. (2022). IMPLEMENTASI AKREDITASI PROGRAM STUDI BERBASIS 9 KRITERIA MENUJU PERINGKAT UNGGUL. In 14 *JURNAL IDAARAH: Vol. VI* (Issue 1).
- Mahaputra, M. R. (2022). Literature Review Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berpikir Positif. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1>.
- Matippanna, A. (2020a). Rancangan Aktualisasi Yang Inovatif, Efektif dan Sustainable pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. In *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel* (Vol. 1, Issue 1).
- Matippanna, A. (2020b). Rancangan Aktualisasi Yang Inovatif, Efektif dan Sustainable pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 1(1), 111–122.
- Novia, L., Hasan, M., Hidayahni Amin, F., Estining Sejati, A., & Akhyar Akhmad, M. (2020). Pengaruh Workshop Implementasi Nilai-Nilai ANEKA terhadap Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Dasar ASN. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 1(4), 208–216.
- Rizaldy, A., & Sugiyanto, S. (2022). MODERNISASI MINDSET APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI LATSAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL YOGYAKARTA. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3(2), 117–125. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i2.265>.
- S, E. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of knowledge*. 2nd ed. Basket Ridge. Technics Publications.
- Sudaryono, Reni, F., & Siti, R. (2019). PENGARUH PERSEPSI KOMPETENSI DASAR DOSEN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA (Studi pada Prodi

- Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya). *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 1.
- Suharno, S. (2020). KEMAMPUAN KOGNITIF PESERTA LATSAR CPNS DALAM PENCAPAIAN KINERJA PEGAWAI. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.203>.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 17–32. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>.
- Sutrisno, E. (2016). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Syamsunarno, M. B., Fatmawaty, A. A., Munandar, A., & Anggaeni, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Akuaponik Untuk Kemandirian Pangan di Desa Banyuresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 329–341. <https://doi.org/10.29407/ja.v3i2.13851>.
- Utama, A., Kepulauan, P., & Belitung, B. (2022). KOLABORASI PESERTA LATSAR DALAM KEGIATAN AKTUALISASI (STUDI KASUS: AKTUALISASI PESERTA LATSAR DI BKPSDMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Basic Training Participant Collaboration in Actualization Activities (Case Study: Actualization of Basic Training Participant at BKPSDMD Province of Bangka Belitung Islands)). *Jurnal Andragogi* |, 10.
- Wahab Samad, A. (2022). Analisis Data Sumber Daya Manusia dalam Isu-isu Global. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 2(1), 99–110. <https://doi.org/10.55927>.
- Yamin, M., Provinsi, B., & Selatan, S. (2021). Implementasi Pembelajaran Aktualisasi Latsar CPNS pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *JurnalPembangunandanAdministrasiPublik*, 3(2). https://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan_Dasar_Calon_Pegawai_Negeri_Sipil.